

STUNTING BALITA INDONESIA DAN PENANGGULANGANNYA

13

Mohammad Teja

Abstrak

Indonesia termasuk negara dengan prevalensi stunting tertinggi ketiga di South-East Asian Region setelah Timor Leste dan India. Meskipun persentase stunting di Indonesia turun dari 37,8% di tahun 2013 menjadi 27,67% di tahun 2019, namun angka ini masih tergolong tinggi. Tulisan ini mengulas persoalan stunting pada anak di Indonesia dan strategi penanggulangannya. Peningkatan pengetahuan bagi ibu hamil dan pemberian pola asuh yang baik kepada bayi dan balita memiliki andil dalam penanggulangan stunting. Oleh karena itu, pemerintah perlu mendorong semua stakeholder untuk ikut berperan menyelamatkan anak balita dari stunting. Ketersediaan pendampingan secara intensif dan berkesinambungan, serta keterlibatan semua kementerian/lembaga merupakan sarana untuk mengakselerasi pengurangan kasus stunting di Indonesia. DPR RI, terutama Komisi IX perlu melakukan pengawasan lebih intensif dan menyeluruh terhadap kesehatan khususnya kesehatan anak dan ibu hamil yang mengalami gizi buruk, serta mendorong Kementerian Kesehatan melakukan pendampingan secara khusus guna menekan angka stunting di Indonesia.

Pendahuluan

Kasus *stunting* pada anak balita masih menjadi masalah kesehatan yang perlu diwaspadai di Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Menteri Kesehatan pada tanggal 12 November 2019, bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional ke-55 (Kompas.com, 12 November 2019). Data prevalensi anak balita *stunting* yang dikumpulkan *World Health Organization* (WHO) yang dirilis tahun 2018 menyebutkan Indonesia

termasuk ke dalam negara ketiga dengan prevalensi tertinggi di *South-East Asian Region* setelah Timor Leste (50,5%) dan India (38,4%) yaitu sebesar 36,4% (Pusat Data dan Informasi Kemenkes, 2018). Angka prevalensi stunting di Indonesia masih di atas 20%, artinya belum mencapai target WHO yang di bawah 20%.

Bertepatan dengan Hari Anak *Universal* yang jatuh pada tanggal 20 November 2019, *stunting*



perlu dilihat sebagai persoalan yang penting untuk diatasi karena berkaitan dengan kesejahteraan anak. Hal ini pun sejalan dengan komitmen Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut meratifikasi Konvensi PBB 1989 tentang Hak Anak. Konvensi Hak Anak mengandung empat prinsip penting, yaitu non-diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan perkembangan anak, dan penghargaan terhadap pendapat anak. Bisa dikatakan, mengatasi stunting berarti upaya menjalankan prinsip-prinsip dalam Konvensi Hak Anak.

Mengatasi *stunting* juga merupakan bagian dari upaya pemerintah memberikan perlindungan kepada anak. Saat ini Indonesia telah memiliki UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini menjamin anak atas hak-haknya untuk hidup dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Tulisan ini mengulas persoalan stunting pada anak di Indonesia dan strategi penanggulangannya, supaya angka prevalensi stunting terus menurun sesuai dengan target WHO, yaitu di bawah 20%.

Stunting Anak Balita

Gizi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan tumbuh kembang anak yang optimal. Gizi yang cukup dan seimbang sangat diperlukan dalam periode emas pertumbuhan dan perkembangan anak. Periode emas dimulai sejak anak masih di dalam kandungan hingga usia dua

tahun atau yang sering disebut dengan istilah “seribu hari pertama kehidupan anak”. Kekurangan gizi yang terjadi pada periode emas tersebut dapat menyebabkan berbagai masalah, salah satunya adalah masalah gagal tumbuh sehingga anak menjadi lebih pendek (*stunting*) dari standar.

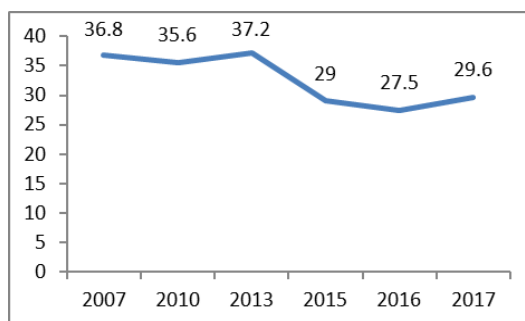
Stunting atau gagal tumbuh adalah suatu kondisi yang menggambarkan status gizi kurang yang memiliki sifat kronis pada masa pertumbuhan dan perkembangan anak sejak awal masa kehidupan yang dipresentasikan dengan nilai *z-score* tinggi badan menurut umur kurang dari minus dua standar deviasi berdasarkan standar pertumbuhan menurut WHO (Ni'mah, 2015: 13). Kondisi stunting dapat dilihat sejak anak berusia dua tahun. *Stunting* merupakan kondisi yang disebabkan oleh kurang seimbangnya asupan gizi pada masa periode emas, bukan disebabkan oleh kelainan hormon pertumbuhan maupun akibat dari penyakit tertentu.

Banyak kajian yang menunjukkan bahwa kemiskinan, kesehatan sanitasi dan lingkungan adalah faktor lain yang memiliki konsekuensi *stunting* pada anak balita. Selain itu, pendidikan dan pengetahuan ibu yang rendah juga berpengaruh besar terhadap kejadian *stunting* pada balita (Aridiyah, 2015). Keadaan sosial ekonomi masyarakat, karakteristik ibu saat hamil, pola asuh juga lingkungan dan kondisi geografis (kepadatan penduduk, kondisi iklim dan sanitasi yang tidak memadai) juga merupakan faktor yang ikut berpengaruh (Danila, 2018).

Stunting berdampak buruk bagi pertumbuhan anak, dan berpengaruh pada kualitas manusia di masa depan. Anak yang terkena *stunting* dapat terhambat perkembangan otaknya. Setelah ia dewasa, kecerdasan dan performa edukasinya menjadi tidak optimal, di samping bisa juga terkena risiko penyakit metabolik (sains.kompas.com, 16 November 2019).

Kasus *Stunting* Anak Balita di Indonesia

Prevalensi *stunting* anak balita di Indonesia cenderung statis. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 menunjukkan prevalensi *stunting* di Indonesia sebesar 36,8%. Pada tahun 2010, terjadi sedikit penurunan menjadi 35,6%. Namun prevalensi *stunting* kembali meningkat pada tahun 2013, yaitu menjadi 37,2%. Persentase ini hampir sama dengan jumlah balita *stunting* di Ethiopia (sains.kompas.com, 18 Oktober 2019). Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) tahun 2015, prevalensi *stunting* di Indonesia adalah 29%. Angka ini mengalami penurunan pada tahun 2016 menjadi 27,5%, namun kembali meningkat menjadi 29,6% pada



Sumber: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan

Grafik 1. Prevalensi *Stunting* Tahun 2007- 2017.

tahun 2017. Gambar 1 di bawah ini merupakan data prevalensi *stunting* dari tahun 2007 hingga 2017:

Berdasarkan data PSG tahun 2017, persentase *stunting* yang paling meresahkan ada di Provinsi NTT, yaitu mencapai 40,3%. Berbeda dengan Provinsi NTT, Provinsi Bali menjadi provinsi dengan angka prevalensi *stunting* terendah, yaitu 19,1%. Di tahun 2019 angka prevalensi *stunting* nasional turun menjadi 27,67%. Meski terlihat ada penurunan angka prevelensi, tetapi *stunting* dinilai masih menjadi permasalahan serius di Indonesia karena angka prevalensi masih di atas 20%. Hal ini dikatakan oleh Menteri Kesehatan periode lalu, dan menitipkan pekerjaan berat kepada menteri yang sekarang untuk terus menurunkan angka *stunting* menjadi 20% atas anjuran WHO.

Strategi Penanggulangan *Stunting*

Dalam rangka memberikan jaminan penurunan prevalensi *stunting* anak balita, Pemerintah sebenarnya telah memiliki landasan program pangan dan gizi dalam UU No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025. Terjaminnya ketersediaan pangan yang meliputi produksi, pengolahan, distribusi dan konsumsi pangan dengan kandungan gizi yang cukup diharapkan dapat menurunkan prevalensi kekurangan gizi pada kantong-kantong *stunting* dalam wilayah Indonesia.

Untuk memberikan dukungan pengurangan kasus *stunting*, tentunya diperlukan kerja sama yang

melibatkan semua *stakeholder*. Koordinasi dan keterlibatan semua kementerian terkait diperlukan untuk menjamin kemudahan anak mendapatkan gizi yang baik. Keterlibatan semua unsur masyarakat secara kolektif juga diperlukan guna meningkatkan gizi anak Indonesia. Bagian yang tak kalah pentingnya adalah memberikan pelayanan kesehatan neonatal kepada ibu hamil secara intensif dan mendorong ibu untuk memberikan Air Susu Ibu (ASI) secara eksklusif.

Perlu dipahami, kasus stunting merupakan kasus multidimensi yang tidak hanya terjadi pada anak dari keluarga miskin, tetapi juga pada keluarga yang berada di atas 40% tingkat kesejahteraannya (Suara.com, 8 Agustus 2018). Ini menunjukkan bahwa memberikan pengetahuan kepada ibu hamil dan pasca melahirkan tentang asupan gizi yang benar dan beragam merupakan upaya penting. Ibu hamil dan pasca melahirkan membutuhkan asupan gizi yang cukup dan bervariasi. Keterbatasan pengetahuan ibu akan beresiko pada kesehatan dan pertumbuhan anak, baik dalam kandungan dan perkembangannya. Hal ini diperkuat oleh penelitian Rahma (2016) yang berkesimpulan bahwa ibu muda yang balitanya mengalami *stunting* memiliki pengetahuan yang rendah tentang gizi (Rahma, 2016). Peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya gizi ibu saat anak masih dalam kandungan hingga anak berumur 2 tahun menjadi pekerjaan rumah besar pemerintah daerah dan pemerintah pusat.

Untuk meningkatkan pengetahuan tentang gizi bagi anak/balita dan kesehatan neonatal pada ibu hamil dan pasca melahirkan, diperlukan kegiatan, dukungan dan layanan kepada keluarga. Pendampingan bisa dilakukan dengan memberikan nasihat, perhatian, mengajak, memberikan dan mendiskusikan sebuah solusi terhadap sebuah permasalahan, memotivasi, menunjukkan dan memberikan pengetahuan tentang akses pelayanan kesehatan. Keikutsertaan keluarga, seperti suami, istri dan masyarakat merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Semua bisa menjadi pendamping yang dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan perhatian atas perkembangan ibu hamil dan balita. Pendamping juga harus memiliki latar belakang pengetahuan gizi dan telah mendapatkan pelatihan pendampingan.

Penutup

Pengetahuan ibu baik terhadap asupan gizi saat ia mengandung calon bayi dan memberikan nutrisi pada bayi dan balitanya menjadi penting untuk menghambat stunting pada anak. *Stunting* dapat dicegah saat janin masih di kandungan dan anak umur 0 hingga 2 tahun, yaitu dengan asupan gizi yang benar dan pemberian ASI eksklusif. Memberikan pengetahuan kepada ibu hamil dan pasca melahirkan tentang asupan gizi yang benar dan beragam merupakan upaya penting.

DPR RI, melalui Komisi IX, perlu melakukan pengawasan atas kejadian dan upaya pengurangan

kasus *stunting* di Indonesia. DPR RI perlu melakukan koordinasi dengan semua kementerian terkait untuk ikut berperan dalam praktik pengasuhan yang baik, peningkatan pelayanan kesehatan pada masa kehamilan, persalinan dan setelah persalinan, membuka akses keluarga terhadap ketersediaan sumber makanan bergizi, air bersih dan sanitasi yang layak. DPR RI juga perlu mendorong pemberian akses pendampingan kepada keluarga dan masyarakat secara berkesinambungan untuk meningkatkan pengetahuan terhadap gizi terbaik bagi janin dan anak balita.

Referensi

- "6 Tahun Terakhir Angka *Stunting* Di Indonesia Turun 10, persen?", <https://sains.kompas.com/read/2019/10/18/180700523/>, diakses 20 November 2010.
- Aridiyah, Farah Okky, Ninna Rohmawati, Mury Ririanty. (2015). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kejadian *Stunting* pada Anak Balita di Wilayah Pedesaan dan Perkotaan". *E-Jurnal Pustaka Kesehatan*, Vol. 3, No. 1, 2015.
- Danila, Ira Deseilla Pawa, Astri Choiruni, Asih Wijayanti. (2018). "Geospatial Analysis pada Prevalensi *Stunting* di Kabupaten Manggarai". *Berita Kedokteran Masyarakat, UGM Public Health Symposium*, Vol 34, No 11, 2018.
- "Di Mana Provinsi dengan *Stunting* Tertinggi 2017?", <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/04/08/di-mana-provinsi-dengan-stunting-tertinggi-2017>, diakses 20 November 2019.
- "Kasus *Stunting* Ditemukan Di 80 Desa Di NTT", <https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/ptp7qc459/>, diakses 20 November 2019.
- Ni'mah, Khoirun, dan Siti Rahayu Nadhiroh. (2015). "Faktor Yang Berhubungan Dengan Kejadian *Stunting* Pada Balita". *Media Gizi Indonesia*, Vol. 10, No. 1, hal. 13-19, 2015.
- "Pernah Bingungkan Moeldoko Apa Itu *Stunting* Dan Bagaimana Efeknya", <https://sains.kompas.com/read/2019/11/16/140500723/>, diakses 20 November 2019.

Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan RI. (2018). Situasi Balita Pendek (*Stunting*) di Indonesia. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.

Rahma, Amelinda Calida, dan Siti Rahayu Nadhiroh. (2016). "Perbedaan Sosial Ekonomi dan Pengetahuan Gizi Ibu Balita Gizi Kurang dan Gizi Normal." *Media Gizi Indonesia*, Vol. 11, No. 1, hal. 55-60, 2016.

Sekretariat Wakil Presiden Indonesia. (2007). "100 Kabupaten/Kota Prioritas

untuk Intervensi Anak Kerdil (*Stunting*), Ringkasan" Jakarta: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

"*Stunting* Akibat Kekurangan Gizi Tak Hanya Dirasakan Orang Miskin", <https://www.suara.com/bisnis/2018/08/08/145809/stunting-akibat-kekurangan-gizi-tak-hanya-dirasakan-orang-miskin>, diakses 20 November 2019



Mohammad Teja
teja@dpr.go.id

Mohammad Teja, S.Sos., M.Si., menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Jayabaya jurusan Hubungan Internasional pada tahun 2000 dan pendidikan Magister (S2) Magister Sosiologi Universitas Padjadjaran Bandung pada tahun 2002. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Muda Sosiologi pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui buku antara lain: "Pola Konsumsi Masyarakat Indonesia sebagai Instrumen Pengendali dalam Pembangunan Berkelanjutan" (2013), Peran CSR Dalam Upaya Meredam Konflik Sosial" (2015), "Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Miskin di Pesisir Pantai" (2015).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.